

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntansi

1. Pengertian Akuntansi

Menurut *American Institute of Certified Public Accounting (AICPA)* Akuntansi adalah suatu seni pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran melalui cara yang tertentu dan berupa satuan uang, transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian, yang sedikitnya sebagian berkaitan dengan keuangan serta menafsirkan hasilnya (Kartikahadi et al., 2023)

Akuntansi menurut Wild dan Shaw adalah sebagai sistem informasi dan pengukuran yang berfungsi untuk mengidentifikasi, mencatat, dan menyampaikan aktivitas bisnis di dalam suatu organisasi (Oktavia et al., 2025)

Akuntansi adalah yang menyediakan laporan kepada pengguna mengenai aktivitas ekonomi dan situasi bisnis (Kartikahadi et al., 2023). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, mencatat dalam buku-buku bisnis, dan menyampaikan dalam bentuk laporan keuangan yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam bisnis.

Dari definisi akuntansi, dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, dan pelaporan informasi keuangan yang memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan untuk mengambil keputusan dalam suatu perusahaan. Akuntansi memainkan

peran penting dalam menyajikan kondisi keuangan perusahaan secara jelas dan dapat diandalkan.

2.2 Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah suatu prinsip, metode, dan prosedur yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Standar ini dirancang untuk memastikan transparansi, dan akurasi dalam pelaporan keuangan (Sukma et al., 2025).

Standar akuntansi di Indonesia terdiri atas 5 standar dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia (Siswanti et al., 2022) yaitu sebagai berikut:

1. PSAK-IFRS (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan-*International Financial Report Standart*)

PSAK-IFRS adalah istilah alternatif untuk SAK (Standar Akuntansi Keuangan) yang diterapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 2012. Standar ini berlaku untuk entitas yang bertanggung jawab secara publik, termasuk perusahaan publik, lembaga asuransi, perbankan, BUMN, dan perusahaan dana pensiun.

2. SAK-ETAP (Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntansi Publik)

Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntansi Publik (SAK-ETAP) diterapkan untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik secara signifikan dan laporan keuangannya ditujukan untuk kepentingan umum bagi pengguna eksternal.

3. PSAK-Syariah (Pernyataan Standar Akuntansi Syariah)

PSAK-Syariah adalah panduan bagi berbagai lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah, pegadaian syariah, badan zakat, dan entitas serupa lainnya. Standar akuntansi ini dikembangkan dengan merujuk pada fatwa yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

4. SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan)

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk diterapkan pada entitas pemerintah dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) serta Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Standar ini dirancang untuk memastikan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih.

5. SAK-EMKM

Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK-EMKM) telah diberlakukan secara efektif mulai tanggal 1 Januari 2018. Standar ini dirancang sebagai bentuk penyederhanaan dari Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), dengan tujuan utama untuk mengurangi kompleksitas pelaporan keuangan bagi entitas-entitas tersebut. Dalam kerangka SAK EMKM, laporan keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah hanya terbatas pada laporan posisi

keuangan, yang pada dasarnya merupakan neraca yang mencerminkan kondisi aset, liabilitas, dan ekuitas pada suatu titik waktu tertentu.

2.3 Pengertian Persediaan

Dalam akuntansi, persediaan mengacu pada kumpulan barang atau bahan yang dimiliki oleh suatu perusahaan untuk dijual atau digunakan dalam proses produksi. Persediaan ini mencakup berbagai jenis barang, seperti bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi, yang semuanya memainkan peran penting dalam daftar aset perusahaan (Alwi & Mariadi, 2025)

Persediaan adalah Aset Lancar yang terdiri dari barang dagangan, yang dibeli untuk untuk dijual kembali. Perusahaan dagang hanya memiliki 1 (satu) jenis persediaan yaitu, barang jadi (*finished goods*) atau dinamakan dengan barang dagangan (Wardani et al., 2023). Berdasarkan definisi ini, persediaan memiliki karakteristik sebagai aset lancar perusahaan dan digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Persediaan dapat dijual kembali untuk menghasilkan keuntungan bagi perusahaan dan rentan terhadap penurunan nilai akibat kerusakan fisik atau perubahan permintaan pasar bervariasi tergantung pada jenis usaha.

1. Klasifikasi Persediaan

Klasifikasi persediaan dapat bervariasi antar entitas. Pada perusahaan perdagangan, persediaan dikenal sebagai persediaan barang dagangan, yang terdiri dari satu kategori saja. Barang dagangan adalah

produk yang diperoleh perusahaan perdagangan untuk dijual kembali dalam operasinya. Di sisi lain, perusahaan manufaktur membagi persediaannya menjadi tiga jenis, yaitu persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Oleh karena itu, di perusahaan manufaktur, bahan baku diubah menjadi produk akhir sebelum dijual kepada konsumen (Hery, 2020).

2. Biaya-biaya Persediaan

Manajemen persediaan merupakan salah satu fokus utama manajemen. Manajemen yang efektif akan memudahkan proses produksi, mengurangi biaya, dan pada akhirnya meningkatkan keuntungan perusahaan, yang merupakan tujuan utama setiap organisasi bisnis (Utama et al., 2019). Berikut adalah biaya yang terkait dengan persediaan:

a. Biaya Penyiapan

Biaya penyiapan adalah biaya yang dikeluarkan ketika perusahaan memproduksi bahan baku secara internal. Dengan kata lain, perusahaan menanggung biaya penyiapan untuk memproduksi komponen tertentu. Biaya ini meliputi waktu henti mesin, persiapan tenaga kerja langsung, penjadwalan, dan pengiriman.

b. Biaya Pemesanan (Pembelian)

Setiap kali bahan baku dipesan, perusahaan akan menanggung biaya pemesanan. Biaya ini meliputi pengolahan pesanan dan pengiriman, gaji karyawan, biaya telepon dan internet,

biaya administrasi, pengemasan dan penimbangan, pemeriksaan penerimaan, pengiriman ke gudang, dan biaya utang jangka pendek.

c. Biaya Penyimpanan

Biaya penyimpanan (biaya penyimpanan atau biaya pemeliharaan) bergantung pada jumlah persediaan. Semakin banyak bahan yang disimpan, semakin besar biaya penyimpanan per periode. Biaya penyimpanan meliputi:

Biaya fasilitas penyimpanan, seperti pencahayaan, pemanasan, pendinginan, atau fasilitas lainnya.

- 1) Biaya modal, yaitu pendapatan alternatif dari dana yang diinvestasikan dalam persediaan.
- 2) Biaya obsolesensi akibat limbah produksi atau barang rusak.
- 3) Biaya penghitungan fisik dan rekonsiliasi laporan.
- 4) Biaya asuransi persediaan.
- 5) Biaya pajak persediaan.

d. Biaya Kekurangan atau Kehabisan Persediaan

Biaya kekurangan atau kehabisan persediaan adalah biaya yang paling sulit untuk diperkirakan. Biaya ini timbul ketika persediaan tidak memenuhi permintaan. Biaya ini meliputi kehilangan penjualan, kehilangan pelanggan, biaya pemesanan tambahan, pengiriman, perbedaan harga, gangguan operasional, dan biaya tambahan untuk aktivitas manajerial.

2.4 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 202 Tahun 2024

PSAK No. 202 Tahun 2024 adalah standar akuntansi yang mengatur pengelolaan akuntansi persediaan. Perubahan nomor dari PSAK No. 14 menjadi PSAK No. 202 disetujui pada tanggal 12 Desember 2022 dan berlaku efektif mulai 1 Januari 2024. Berikut adalah penjelasannya (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2024).

1. Tujuan

Tujuan Pernyataan ini adalah untuk menetapkan pengelolaan akuntansi persediaan. Masalah utama dalam akuntansi persediaan meliputi penentuan jumlah biaya yang diakui sebagai aset dan pengelolaan akuntansi selanjutnya atas aset-aset tersebut hingga pendapatan terkait diakui. Pernyataan ini memberikan panduan dalam menentukan biaya dan pengakuan selanjutnya sebagai beban, termasuk penyusutan nilai realisasi bersih. Pernyataan ini juga memberikan panduan mengenai rumus biaya yang digunakan untuk menentukan biaya persediaan.

2. Ruang Lingkup

PSAK No. 202 paragraf 2 menyatakan bahwa: Pernyataan ini berlaku untuk semua persediaan, kecuali:

- a. Dikosongkan
- b. Instrumen keuangan (lihat PSAK 232: Instrumen Keuangan: Penyajian dan PSAK 109 Instrumen Keuangan); dan
- c. Aset biologis yang terkait dengan kegiatan pertanian dan produk

pertanian pada saat panen (lihat PSAK 241: Pertanian).

PSAK No. 202 paragraf 3 menyatakan bahwa: Pernyataan ini tidak berlaku untuk pengukuran persediaan yang dikendalikan oleh:

- a. Produsen produk pertanian dan kehutanan, produk pertanian setelah panen, serta mineral dan produk mineral, selama persediaan tersebut diukur berdasarkan nilai realisasi bersih sesuai dengan praktik yang berlaku di industri. Jika persediaan diukur berdasarkan nilai realisasi bersih, perubahan nilai tersebut diakui dalam laba atau rugi pada periode di mana perubahan tersebut terjadi.
- b. Pialang komoditas yang mengukur persediaan mereka berdasarkan nilai wajar dikurangi biaya penjualan. Jika persediaan diukur berdasarkan nilai wajar dikurangi biaya penjualan, perubahan nilai wajar dikurangi biaya penjualan diakui dalam laba atau rugi pada periode di mana perubahan tersebut terjadi.

3. Definisi

Menurut PSAK 202, persediaan adalah aset:

- a. Barang untuk dijual: Persediaan berupa barang yang dipegang dan disimpan untuk dijual dalam kegiatan bisnis usaha biasa sehari-hari
- b. Barang yang sedang diproduksi: Persediaan juga mencakup barang yang sedang dalam proses pembuatan untuk dijual nanti
- c. Bahan baku atau perlengkapan: Persediaan juga bisa berupa bahan mentah yang digunakan untuk membuat barang atau menyediakan jasa.

4. Pengukuran Persediaan

PSAK No. 202 paragraf 9 menetapkan bahwa persediaan diukur pada nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih. Artinya, perusahaan harus mencatat persediaan sesuai harga yang lebih rendah antara biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan persediaan tersebut atau nilai yang bisa diperoleh dari penjualan persediaan, setelah dikurangi biaya penyelesaian dan penjualan. Biaya persediaan meliputi semua biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang dikeluarkan hingga persediaan mencapai kondisi dan lokasi saat ini. Teknik pengukuran biaya persediaan, seperti metode biaya standar atau metode eceran demi kemudahan dapat digunakan jika hasilnya mendekati biaya. Biaya standar memperhitungkan level normal penggunaan bahan dan perlengkapan, tenaga kerja, efisiensi, dan kapasitas. Biaya standar ditelaah secara regular dan jika diperlukan, di revisi sesuai dengan kondisi terkini.

5. Pengakuan sebagai Beban

Ketika persediaan dijual, jumlah persediaan yang tercatat diakui sebagai beban pada periode di mana pendapatan dari penjualan diakui. Setiap penurunan nilai persediaan hingga nilai realisasi bersihnya dan semua kerugian persediaan diakui sebagai beban pada periode di mana penurunan atau kerugian tersebut terjadi. Setiap pembalikan penurunan nilai persediaan akibat peningkatan nilai realisasi bersih diakui sebagai pengurangan jumlah persediaan yang diakui sebagai beban pada periode

di mana pembalikan tersebut terjadi (Paragraf 34).

Contoh biaya yang dikeluarkan dari biaya persediaan dan diakui sebagai beban alam periode terjadinya adalah:

- a. Jumlah yang tidak normal atas pemborosan bahan, tenaga kerja, atau biaya produksi lainnya;
- b. Biaya penyimpanan, kecuali biaya tersebut diperlukan dalam proses produksi sebelum tahap produksi selanjutnya;
- c. Overhead administrasi yang tidak memberikan kontribusi untuk membuat persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini;
- d. Biaya penjualan.

6. Pengungkapan

PSAK No. 202 paragraf 36 mensyaratkan laporan keuangan untuk mengungkap:

- a. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam pengukuran persediaan, termasuk rumus biaya yang digunakan;
- b. Jumlah total nilai buku persediaan dan nilai buku berdasarkan klasifikasi yang sesuai untuk entitas;
- c. Nilai buku persediaan yang dicatat pada nilai wajar dikurangi biaya penjualan;
- d. Jumlah persediaan yang diakui sebagai beban selama periode saat ini;
- e. Jumlah setiap penyusutan persediaan yang diakui sebagai beban pada periode berjalan sesuai dengan paragraf 34;

- f. Jumlah pembalikan penyusutan yang diakui sebagai pengurangan jumlah persediaan yang diakui sebagai beban pada periode berjalan sesuai dengan paragraf 34;
- g. Kondisi atau peristiwa yang menyebabkan pembalikan penyusutan persediaan sesuai dengan paragraf 34; dan
- h. Jumlah persediaan yang dijamin sebagai jaminan untuk liabilitas.

2.5 Metode Pencatatan Persediaan

Menurut (Zulva, 2024) metode pencatatan persediaan ada 2 macam yaitu sebagai berikut:

1. Metode Periodik (fisik)

Metode fisik atau periodik yaitu metode yang mengharuskan perusahaan untuk melakukan perhitungan langsung di gudang guna menentukan jumlah persediaan barang pada akhir periode akuntansi. Perhitungan jumlah persediaan melalui inventarisasi sangat bergantung pada kelengkapan data, catatan, dan perhitungan yang akurat terhadap barang-barang tersebut. Pencatatan transaksi persediaan menggunakan metode periodik dilakukan dengan jurnal sebagai berikut:

Pencatatan pembelian secara tunai/kredit

Pembelian barang dagang	xxx
Kas/utang dagang	xxx

2. Metode Perpetual

Metode Perpetual yaitu sistem persediaan berkelanjutan secara terus-menerus memantau perubahan pada akun persediaan, di mana setiap pembelian dan penjualan barang langsung dicatat dalam akun pada saat transaksi berlangsung. Melalui sistem ini, biaya barang yang dijual dan jumlah persediaan barang pada akhir periode akuntansi dapat ditentukan dengan akurat. Jurnal dalam mencatat transaksi persediaan dengan menggunakan metode perpetual yaitu:

Pencatatan transaksi pembelian persediaan barang dagang

Persediaan barang dagang	xxx
Kas/utang dagang	xxx

Pencatatan penjualan secara tunai/kredit

Kas/piutang dagang	xxx
Penjualan	xxx
Harga pokok penjualan	xxx
Persediaan barang dagang	xxx

2.6 Metode Penilaian Persediaan

Menurut (Zulva, 2024) metode penilaian persediaan ada beberapa macam yang umum digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Metode Identifikasi Khusus

Metode identifikasi khusus diterapkan dengan identifikasi setiap unit barang yang telah dijual dan setiap unit yang disimpan dalam akun persediaan. Biaya total barang yang dijual dialokasikan ke biaya barang

yang dijual, sementara biaya barang spesifik yang masih tersedia dimasukkan ke dalam akun persediaan. Dalam akuntansi, identifikasi khusus merujuk pada proses pengenalan data yang memungkinkan suatu entitas untuk membedakan aset, liabilitas, pendapatan, atau biaya terpisah.

2. Metode Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP) / *First In First Out* (FIFO)

Metode *First In First Out* (FIFO) adalah pendekatan di mana barang yang pertama kali masuk ke persediaan akan menjadi yang pertama keluar. Dalam metode ini, biaya barang yang dijual ditentukan berdasarkan harga pembelian barang yang pertama kali masuk ke persediaan. Metode FIFO sering diterapkan karena memberikan gambaran yang lebih akurat tentang biaya persediaan dan laba perusahaan.

3. Metode Rata-Rata Tertimbang (*Average*)

Metode rata-rata merupakan pendekatan untuk menentukan biaya per unit yang didasarkan pada rata-rata tertimbang dari unit setara dan biaya pembelian unit-unit tersebut selama periode yang sama. Pendekatan ini menghasilkan biaya rata-rata per unit dengan membagi total biaya barang yang tersedia untuk dijual dengan jumlah unit yang tersedia untuk dijual. Selanjutnya, biaya barang yang dijual dihitung menggunakan biaya rata-rata per unit.

4. Metode Masuk Terakhir Keluar Pertama (MTKP) / *Last In First Out* (LIFO)

Metode *Last In First Out* (LIFO) adalah pendekatan yang mengasumsikan bahwa barang-barang yang masuk ke persediaan paling akhir adalah yang pertama kali dijual. Dalam akuntansi, metode ini menetapkan biaya barang-barang yang masuk paling akhir sebagai biaya barang-barang yang dijual pertama kali. Dalam PSAK No. 202 tidak diperkenankan perusahaan untuk menggunakan metode *Last In First Out* (LIFO).

2.7 Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini maka dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang pernah peneliti baca diantaranya.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Sari et al., (2025)	Analisis Pencatatan dan Penilaian Persediaan Barang Dagang Berdasarkan PSAK No. 202 pada PT. Surya Baja Kencana Palembang	Deskriptif kualitatif	Perusahaan menggunakan metode periodik. Peneliti merekomendasikan ke metode perpetual dan FIFO agar laporan keuangan lebih akurat sesuai PSAK 202.
2	Hardilla et al., (2024)	Analisis Penerapan Metode Pencatatan dan Penilaian Persediaan Barang Dagang Berdasarkan PSAK No 202 pada Astra Motor Kolaka	Deskriptif Kualitatif	Astra Motor Kolaka menggunakan metode pencatatan periodik dan penilaian FIFO. Pencatatan belum dilakukan secara <i>real-time</i> , sehingga terjadi kesalahan input.

No	Nama	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
3	Sunjaya & Usman, (2025)	Analisis Penerapan Akuntansi Persediaan Berdasarkan PSAK 202 Pada PT Avia Avian Tbk	Deskriptif Kualitatif	Persediaan pada PT Avia Avian Tbk sesuai dengan PSAK 202 (2024). Perusahaan mengklasifikasikan persediaan secara rinci, mengukur berdasarkan nilai terendah antara biasa pelaporan dan nilai realisasi neto dengan metode rata-rata tertimbang.
4	Mendrofa et al., (2026)	Analisis Akuntansi Persediaan Barang Dagang Berdasarkan PSAK No. 202 (Studi Kasus pada Indomaret IDF Sipoholon)	Deskriptif Kualitatif	Penerapan akuntansi persediaan di Indomaret IDF Sipoholon telah sesuai dengan ketentuan PSAK No. 202. Namun, masih terdapat kekurangan, seperti penerapan FIFO yang belum optimal, dan pengungkapan laporan persediaan yang masih terbatas. Secara keseluruhan, tingkat kesesuaian penerapan PSAK 202 mencapai sekitar 90%.
5	Nuraini et al., (2025)	Analisis Penerapan PSAK No. 14 dalam Metode Penilaian dan Pencatatan Persediaan pada KUD Kandangan, Simalungun	Deskriptif Kualitatif	KUD Kandangan menerapkan metode pencatatan perpetual dan penilaian FIFO. Praktik ini dinilai sesuai dengan PSAK No. 14 dan mempermudah penyusunan laporan keuangan.

Sumber: Berbagai Jurnal Penelitian, 2026